

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era modern sekarang ini, sektor perbankan memainkan fungsi penting dalam memajukan perekonomian suatu negara. Salah satunya sebagai sumber utama penghasil Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, melalui perannya sebagai *financial intermediary* atau sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus) dengan pihak yang membutuhkan dana (defisit) tetapi memiliki prospek usaha. Bank disebut juga sebagai *Agent of Development*, karena bank mampu memberikan dana untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di suatu negara guna memperlancar kegiatan ekonomi di sektor riil. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat dengan memberikan aktivitas dan layanan bagi masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan pendapatan dengan melakukan kegiatan investasi, distribusi, konsumsi barang dan jasa, dan kegiatan pemanfaatan uang lainnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyatakan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”. Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) Nomor 31, mendefinisikan bank sebagai perantara keuangan antara berbagai pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Hal di atas menyimpulkan bank sebagai jenis lembaga perantara keuangan yang berwenang untuk menerima simpanan, meminjamkan uang, dan menerbitkan gadai atau uang kertas.

Sektor perbankan juga menjadi salah satu kategori investasi saham terbaik jika dilihat dari tingkat keamanannya. Hal tersebut dikarenakan industri perbankan memiliki pengawasan ketat yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan setiap nasabah (deposan/penabung) juga akan mendapat jaminan keamanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di sisi lain investor dapat menggunakan teknik analisis CAMELS (*Capital, Assets quality, Management, Earnings, Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk*), untuk menganalisis tingkat kesehatan bank

Bank memiliki modal yang besar dalam mengumpulkan dana dari masyarakat yang diperoleh dari dana pihak ketiga (DPK). DPK memiliki peran penting bagi kegiatan operasional bank dalam membiayai operasionalnya, dengan sumber dana tersebut sebagai ukuran kinerjanya (Kasmir, 2002:64). DPK dapat berasal dari simpanan seperti tabungan, giro, deposito, dan penempatan lainnya. Peningkatan DPK umumnya dialokasikan untuk penyaluran kredit yang biasanya selalu meningkat, sehingga mengakibatkan pertumbuhan pendapatan bank yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank.

Krisis moneter merupakan salah satu krisis keuangan yang memberikan dampak besar, tidak hanya di satu wilayah, tetapi berdampak ke banyak wilayah. Krisis moneter terjadi antara lain ketika harga aset turun secara signifikan, perusahaan dan konsumen tidak mampu untuk membayar hutangnya, dan lembaga keuangan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas.

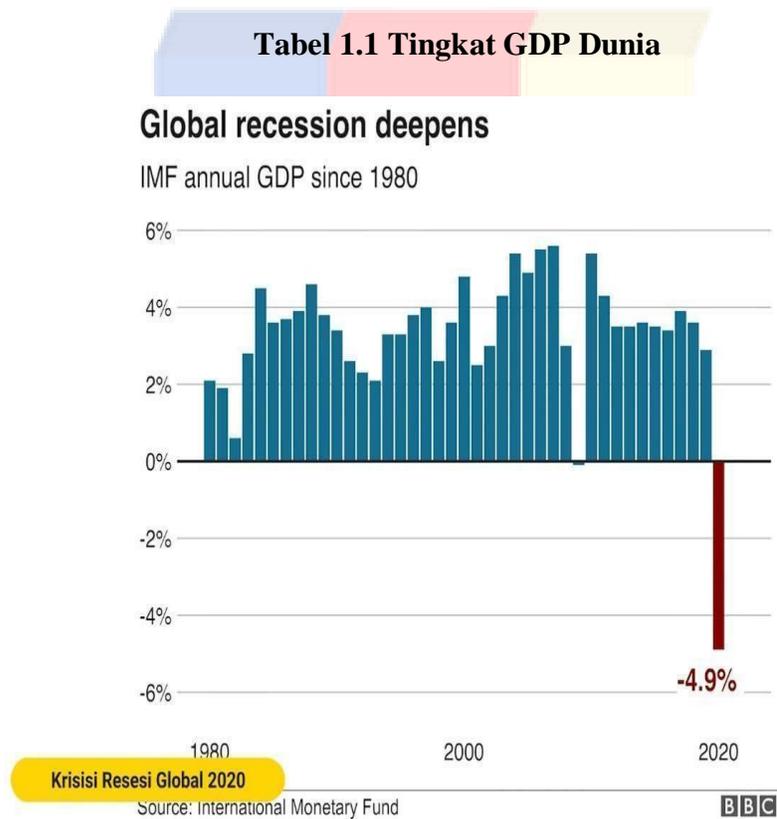
Krisis yang terjadi pada tahun 1998, bermula dengan terjadinya krisis di Thailand dan menjadi penyebab krisis finansial di Asia, termasuk di Indonesia, yang kemudian berdampak pada sektor perbankan. Bangkrutnya 16 bank di Indonesia dianggap sebagai pemicu krisis kepercayaan masyarakat kepada bank. Pemerintah memberikan dana talangan kepada nasabah yang menyimpan dana di 16 bank tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mencegah krisis perbankan (*systemic risk*) dan besarnya risiko yang diterima masyarakat (*economic cost*) agar tidak semakin meluas. Namun hal itu memicu masyarakat untuk melakukan penarikan dana secara terus menerus dan dalam jumlah besar (*bank run*), sehingga beberapa bank mengalami kesulitan dalam menyediakan dana untuk membayar tabungan maupun deposito yang ditarik oleh nasabah. Bank Indonesia (BI) selanjutnya membuat kebijakan untuk mengganti saldo debit bank yang mempunyai harapan dapat dipulihkan operasionalnya dengan Surat Berharga Pasar Uang Khusus (SBPUK). Pembuatan kebijakan ini, diharapkan agar tidak ada lagi bank yang mengalami kebangkrutan dikarenakan masalah likuiditas.

Krisis yang terjadi pada tahun 2008 dipicu oleh kredit KPR atau biasa dikenal sebagai surat utang (*subprime mortgage*) di Amerika Serikat (AS) yang sangat besar sementara dana penyangganya sangat minim, dikarenakan banyak masyarakat di AS yang tidak sanggup untuk membayar tagihan KPR itu. Hal ini membuat aliran dana pada institusi keuangan menjadi bermasalah dalam memenuhi kewajiban likuiditasnya. Permasalahan likuiditas industri perbankan di AS pada masa itu timbul, dikarenakan tidak terlalu ketat dalam mengawasi kelayakan pemberian kredit dari masyarakatnya, dan sistem seleksi pemberian kredit dari perbankan juga tidak berjalan dengan baik.

Kredit macet di sektor properti memicu serangkaian peristiwa yang berakhir dengan kegagalan beberapa lembaga keuangan AS. *Default* kredit properti, menyebabkan perusahaan pembiayaan tidak dapat memenuhi komitmennya kepada lembaga keuangan seperti bank investasi dan manajemen aset. Akibat dari hal tersebut, maka likuiditas pasar modal dan sistem perbankan di AS terpengaruh. Likuiditas perbankan terkuras sebagai akibat dari situasi ini karena kurangnya nilai tunai aset untuk memenuhi kewajiban saat itu. Perbankan yang memberikan pinjaman akan menghadapi kebangkrutan, jika tidak dapat memenuhi kewajibannya. Akibat tragedi itu, banyak bank bangkrut akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dikarenakan masalah kewajiban pemenuhan likuiditas.

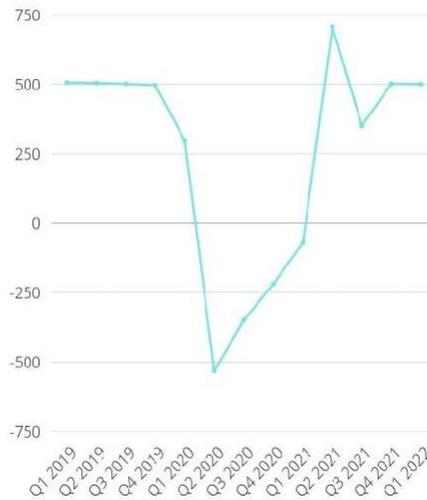
Pandemi *Covid-19* pada periode tahun 2019-2021 selain berdampak pada sektor kesehatan, juga berdampak pada sektor ekonomi, karena miliaran orang di dunia

terganggu aktivitasnya akibat kebijakan *lockdown* dan kebijakan pembatasan aktivitas lainnya. Perlambatan aktivitas ekonomi seperti perdagangan dan konsumsi dapat dilihat dari Tabel 1.1 di bawah, di mana tingkat *Gross Domestic Product* (GDP) kuartal 2 sepanjang tahun 2020 yang mengalami penurunan ekonomi di berbagai belahan dunia sampai akhirnya menyebabkan cukup banyak negara mencapai fase resesi ekonomi.



Sumber : International Monetary Fund, 2020

Tabel 1.2 Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2019 – 2022



Sumber : Trading Economics, 2022

Tabel 1.2 menggambarkan terjadinya penurunan PDB pada laju perekonomian Indonesia di kuartal 2 (April - Juni) tahun 2020 sebesar -5,32% dan kuartal 3 (Juli - Agustus) tahun 2020 sebesar -3,49%, hal ini memperlihatkan Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Dikutip dari detik finance (Hendra, 2020), kepala BPS – Suhariyanto, menyatakan bahwa Indonesia sedikit mengalami resesi ekonomi. Dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2020, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berhasil naik dan berada di 7,07% pada kuartal 2 tahun 2021, jauh meningkat dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2020, dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan hingga kuartal 1

tahun 2022. Hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin membaik, meskipun belum sepenuhnya pulih.

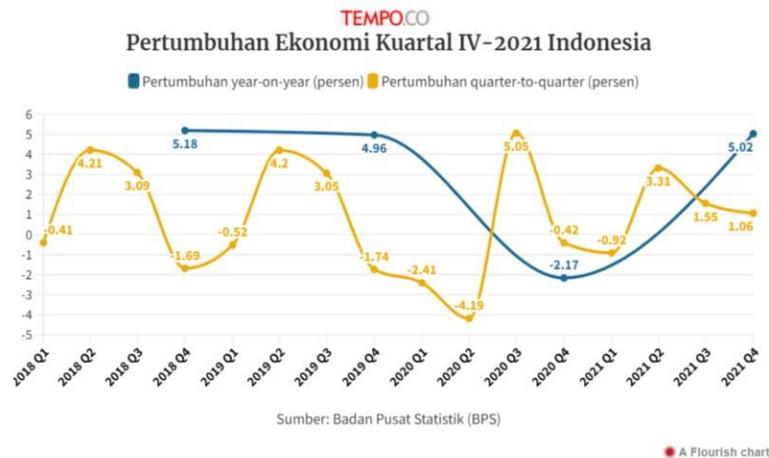
Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Tahun 2020

Negara	Q1'20	Q2'20	Negara	Q1'20	Q2'20
Macau	-48.7	-67.8	Jerman	-2.2	-11.3
Peru	-3.5	-30.2	Ceko	-1.9	-11
India	3.1	-23.9	Turki	4.4	-9.9
Spanyol	-4.1	-22.1	Jepang	-2	-10
Inggris (UK)	-1.7	-21.7	Mongolia	-10.7	-9.7
Tunisia	-1.7	-21.6	Swiss	-0.7	-9.3
Perancis	-5.7	-19.0	Belanda	-0.2	-9.3
Meksiko	-1.4	-18.9	Iceland	-1.7	-9.3
Italia	-5.5	-17.3	AS	0.3	-9.1
Malaysia	0.7	-17.1	Hong Kong	-9.1	-9.0
Filipina	-0.7	-16.5	Latvia	-1.5	-8.9
Portugal	-2.3	-16.3	Rusia	1.6	-8.5
Yunani	-0.5	-15.2	Polandia	2	-8.2
Belgia	-2.4	-14.4	Denmark	-0.1	-8.2
Chile	0.2	-14.1	Swedia	0.4	-8.2
Singapura	-0.3	-13.2	Estonia	-0.7	-6.9
Slovenia	-2.3	-13	Finlandia	-1.3	-6.4
Kanada	-0.9	-13	Australia	1.6	-6.3
Austria	-2.8	-12.8	Indonesia	3.0	-5.3
Thailand	-2.0	-12.2	Korea Selatan	1.4	-2.7
Slowakia	-3.7	-12.1	Taiwan	2.2	-0.6
Ukraina	-1.3	-11.4	Vietnam	3.8	0.4
Brazil	-0.3	-11.4	Tiongkok	-6.8	3.2

Sumber : Trading Economics, 2021

Tabel 1.3 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara yang mengindikasikan terjadinya penurunan ekonomi pada kuartal 2 tahun 2020.

Tabel 1.4 Pertumbuhan ekonomi 2018 - 2021 Di Indonesia

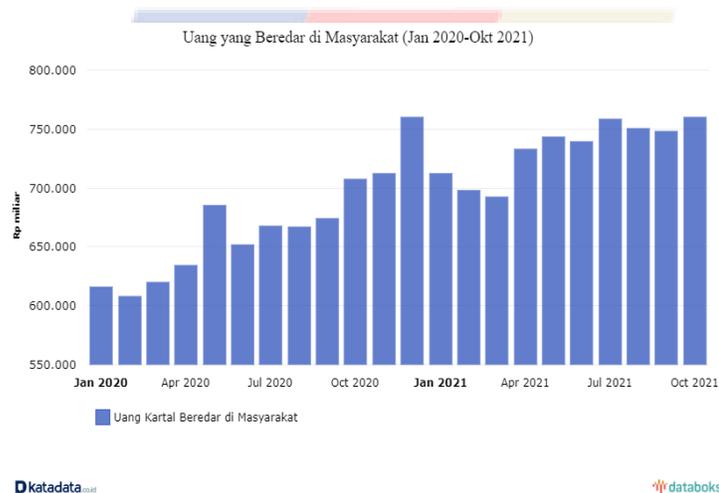


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2022

Data dan grafik Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi 2018-2021 di Indonesia menunjukkan, bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2021 Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang naik dan turun, di mana penurunan dimulai pada kuartal 3 tahun 2019 dan terendah ada di kuartal 2 tahun 2020, selebihnya positif. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 kuartal 1 dan 2 memperlihatkan, bahwa ekonomi di Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai -2,41% pada kuartal 1, dan -4,19% pada kuartal 2. Hal ini disebabkan oleh munculnya pandemi *Covid-19* yang meningkat cukup signifikan mulai menghambat kegiatan ekonomi Indonesia dengan diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku sejak bulan Maret 2020. Namun pada kuartal 3

tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami lonjakan atau peningkatan pertumbuhan dibandingkan dengan kuartal 1 dan 2 tahun 2020. Hal ini mengindikasikan sudah mulai pulihnya kegiatan ekonomi di Indonesia.

Tabel 1.5 Jumlah Uang beredar 2020-2022



Sumber : Bank Indonesia (BI), 2021

Data Bank Indonesia (BI) seperti tertera dalam Tabel 1.5 menunjukkan data peredaran uang di Indonesia umumnya meningkat pada tahun 2020-2021 (kecuali saat terjadi pengetatan PPKM). Hal ini memberikan isyarat, bahwa aktivitas perekonomian masih berjalan dengan baik, meskipun kredit bermasalah ada kecenderungan sedikit naik. Beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas dikarenakan masih mengandalkan

Dana Pihak Ketiga (DPK), oleh karenanya pada saat DPK menyusut, maka tambahan likuiditas diperoleh dari pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) yang diharapkan dapat mengatasi *Non Performing Loan* (NPL).

Kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) yang bertujuan untuk menambah likuiditas dilakukan dengan membeli surat berharga jangka panjang perbankan konvensional, sehingga jumlah uang beredar bertambah dan mendorong peningkatan pemberian pinjaman dan investasi.

Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, menyebutkan akan mengurangi likuiditas (*Tapering off*) pada akhir kuartal 1 tahun 2022, yaitu dengan meningkatkan giro wajib minimum (GWM) per 1 Maret 2022. Hal ini ditandai dengan penghentian stimulus moneter bank sentral AS (*The Fed*). Penurunan likuiditas akan dilakukan secara hati-hati dan komprehensif agar kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit dan pembelian surat berharga negara (SBN) tidak terganggu. Pengurangan likuiditas akan dilakukan melalui kontraksi operasi moneter dan peningkatan Giro Wajib Minimum (GWM). Hal tersebut nantinya akan tetap mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan, serta berlangsungnya pemulihan ekonomi nasional.

Likuiditas menjadi salah satu indikator terpenting untuk mengukur kinerja suatu bank, karena tujuan utama operasional bank adalah mencapai tingkat

profitabilitas yang maksimal. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan menjaga tingkat likuiditas yang baik, yang merupakan pendukung utama dari usaha bank, yaitu tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Bank harus menjaga likuiditas yang cukup dalam fungsinya sebagai entitas perantara, menerima, dan mengarahkan uang publik. Kegagalan bank dalam mengelola keuangan akan berdampak sistematis terhadap situasi keuangan suatu negara. Bank Indonesia (BI) telah menetapkan agar perbankan menjaga tingkat likuiditas yang baik dengan batasan LDR sekitar 85 % dalam kondisi normal.

Likuiditas perbankan merupakan salah satu faktor prioritas yang dijaga oleh Pemerintah dalam rangka mengusahakan peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa. Dampak pengawasan terhadap likuiditas perbankan menggiring pada penelitian akan hubungan beberapa rasio keuangan terhadap likuiditas. Hal ini memberi acuan bagi penelitian untuk menganalisis kemampuan bank di Indonesia dalam mengelola tingkat likuiditasnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengkaji apakah *Return on Asset*, *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Loan*, dan Giro Wajib Minimum memiliki pengaruh terhadap likuiditas (LDR) bank umum yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2018 sampai tahun 2021.

1.2. Rumusan Masalah

Latar belakang dan dugaan yang telah dijelaskan sebelumnya menghasilkan sebuah rumusan masalah untuk diteliti sebagai berikut:

Apakah *Return on Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Loan* (NPL), dan Giro Wajib Minimum (GWM) memiliki pengaruh terhadap Likuiditas (LDR) Bank?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh *Return on Asset* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Loan* (NPL), dan Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap tingkat Likuiditas (LDR) Bank. Hasil penelitian diharapkan memberi informasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi likuiditas secara signifikan dan sebaliknya.

1.4. Batasan Penelitian

Batasan untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Batasan pada penelitian ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perbankan yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI)

2. Data yang ada merupakan data sekunder (laporan tahunan) perusahaan sektor perbankan umum yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan berkontribusi untuk pengembangan teori tentang pengaruh *Return on Asset (ROA)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Loan (NPL)*, dan Giro Wajib Minimum (GWM) terhadap Likuiditas (LDR) Bank.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Industri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan Perusahaan dalam memperhatikan tingkat Likuiditas Bank.
- b. Bagi Investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dalam mempertimbangkan proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kegiatan investasi.
- c. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan teori akuntansi khususnya serta dapat menambah

pengetahuan dan menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

1.6. Sistematika Penulisan

Tujuan untuk lebih memahami penelitian dengan lebih baik mendorong penulisan materi yang terkandung dalam laporan penelitian ini dibedakan ke dalam beberapa komponen dengan sistematika pembuatan sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan

Bab 1 merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan informasi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang kemudian ditinjau secara teoritis dan maupun praktis, serta penjabaran sistematika penulisan.

BAB 2: Landasan Teori

Bab 2 merupakan bagian landasan teori yang mengandung uraian dan pengertian yang diambil dari kutipan majalah, internet, buku dan sumber lain yang dianggap relevan dengan proses dari penulisan laporan skripsi. Hal lain dari landasan teori, *literature interview* menjadi salah satu isi dari bab ini dan dianggap berhubungan dengan penelitian.

BAB 3: Metode Penelitian

Bab 3 adalah bagian dari metode penelitian yang menjelaskan bagaimana peneliti memilih dan menggunakan metode dalam proses penelitian, termasuk variabel penelitian, data penelitian, pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB 4: Analisis dan Hasil Penelitian

Bab 4 adalah bagian analisis dan hasil penelitian di mana dalam bab ini menjabarkan mengenai data penelitian yang mencakup *Return on Asset (ROA)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Loan (NPL)*, dan Giro Wajib Minimum (GWM). Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis, analisis, dan pembahasan terhadap hasil olah data penelitian.

BAB 5: Kesimpulan

Bab 5 merupakan bagian konklusi yang berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, serta implikasi hasil penelitian setelah diteliti.